**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan keuangan diterbitkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat sehingga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama keputusan bersifat ekomomis. Namun, seringkali laporan keuangan pemerintah daerah disajikan hanya untuk memenuhi fungsi pertanggungjawaban saja, padahal laporan keuangan pemerintah daerah harus digunakan sebagai media perencanaan, manajerial dan pengawasan (Hapsari, 2008). Kenyataan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, terbukti dari penelitian Paulsson pada tahun 2006 di Swedia yang mendapatkan hasil bahwa di Swedia para politisi dan manajer senior pemerintahan tidak menggunakan informasi akuntansi akrual yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahnya. Ini adalah fenomena yang menarik, bahwa pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Dalam perspektif pengguna, pengguna akan memanfaatkan laporan keuangan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka (Fontanella, 2010). Sementara Martiningsih (2008) mengemukakan informasi kondisi keuangan, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif dalam pelaporan keuangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh pengguna, sedangkan informasi kondisi ekonomi kurang diperlukan. Ternyata aturan pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Disamping kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, latar belakang pendidikan pengguna akan sangat mempengaruhi pemanfaatan informasi tersebut. Dalam penelitian Hendra, *et al* (2012) ditemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.

Penyusunan laporan keuangan daerah diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Presiden No. 71 tahun 2010, Permendagri 13/2006, dan Permendagri 59/2007. Dalam Peraturan Presiden No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat; (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (4) pemerintah.

Selain dari optimalisasi pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna menjadi sangat penting karena proses penyusunan laporan keuangan telah menelan biaya yang tidak sedikit, infrastruktur yang banyak dan juga sumber daya manusia dalam jumlah besar. Jika informasi yang dihasilkan ini tidak dioptimalkan pemanfaatannya maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian negara dalam jumlah yang besar (Fontanella, 2010).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Fontanella (2010), dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya tingkat pendidikan pengguna, latar belakang pendidikan pengguna, pengetahuan akuntansi pemerintahan yang dimiliki pengguna dan kesesuaian informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan di Kab. Agam tersebut diperoleh bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan daerah, sedangkan pengetahuan akuntansi dan kesesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fontanella (2010), penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini penulis mengembangkan sampel penelitian yaitu pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, auditor BPK RI yang pernah mengaudit laporan pemerintah daerah terkait selaku lembaga pemeriksa, dan pihak internal pemerintah atau pembuat laporan keuangan daerah yaitu kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Perubahan atas peraturan pemerintah terkait Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi pembeda dari penelitian terdahulu, yaitu berlakunya PP No. 71 tahun 2010, dan tidak berlakunya lagi PP No. 24 tahun 2005.

Penelitian ini akan dilakukan pada pemerintah daerah Kota Bukittinggi dengan asumsi tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pengguna informasi laporan keuangan pemerintah di satu daerah dengan daerah lainnya (Nugroho (2004) dalam Fontanella, 2010).

**1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah latar belakang pendidikan pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengetahuan akuntansi pemerintahan yang dimiliki pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kesesuaian informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan informasi yang dibutuhkan pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah?
   1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi pemerintahan pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesesuaian informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
   1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktisi akuntansi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan masukan dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana penelitian akuntansi dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan teori-teori dan review penelitian terdahulu tentang pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah serta pengembangan hipotesis. Pada bab III, penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan antara lain populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data dan operasionalisasi variabel dependen dan independen. Bab IV berisi deskripsi penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab V menyajikan simpulan, keterbatasan dan implikasi penelitian.